

Analisis Ketimpangan Jumlah Pembangunan Sekolah Menengah Atas di Kota Surabaya

Nur Laili Rohmawati¹⁾, Dewi Ratih Hapsari¹⁾, Rama Listiawan Saputra¹⁾,
Arbi Muhammad Gymnastyar¹⁾

1) Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Surabaya

**Corresponding author:*

E-mail: 22040274053@unesa.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan nasional yang berfungsi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerataan akses pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), menjadi indikator strategis dalam menilai keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Kota Surabaya sebagai metropolitan dengan dinamika urbanisasi yang tinggi menghadapi tantangan dalam distribusi pembangunan SMA yang belum merata di seluruh kecamatan. Ketimpangan tersebut tercermin dari perbedaan jumlah sekolah dan ketersediaan fasilitas antarwilayah, yang berimplikasi pada kesenjangan kualitas pendidikan serta akses terhadap layanan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pola spasial sebaran pembangunan SMA di Kota Surabaya, (2) mengukur tingkat ketimpangan jumlah SMA antar kecamatan, dan (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan tersebut. Pendekatan analitis dilakukan melalui integrasi metode spasial dan kuantitatif guna memperoleh representasi empiris mengenai distribusi dan tingkat disparitas pembangunan pendidikan menengah atas. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan yang berbasis bukti (evidence-based policy) serta berorientasi pada keadilan spasial.

Kata Kunci: Ketimpangan Spasial, Pemerataan Pembangunan, Sekolah Menengah Atas, Kota Surabaya

Abstract

Education is a fundamental pillar of national development, functioning to improve the quality of human resources. The equitable distribution of access to education, particularly at the senior high school (SMA) level, is a key indicator in assessing the success of development in the education sector. The City of Surabaya, as a metropolitan area with high urban dynamics, faces challenges in the uneven distribution of SMA development across its districts. This disparity is reflected in differences in the number of schools and the availability of facilities between regions, which in turn has implications for inequalities in educational quality and access to educational services. This study aims to (1) analyze the spatial patterns of SMA development distribution in Surabaya, (2) measure the level of disparity in the number of SMAs across districts, and (3) identify the factors influencing these disparities. The approach employed integrates spatial and quantitative methods to obtain an empirical representation of the distribution and level of disparity in secondary education development. The findings are expected to provide both conceptual and practical contributions for local governments in formulating education development policies based on evidence (evidence-based policy) and oriented toward spatial equity.

Keywords: Spatial Disparity, Development Equity, Senior High Schools, Surabaya City

This is an open access article under the CC-BY-SA

license



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek sangat krusial dalam pembangunan keberlanjutan sebuah negara, karena memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah negara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan dengan menciptakan beberapa kebijakan seperti program wajib belajar 12 tahun, dan pemerataan fasilitas pendidikan di perkotaan maupun pedesaan. Namun, berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Sekolah di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan di distribusi sumber daya pendidikan terutama pada Sekolah Menengah Atas. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan ini seperti faktor geografis, demografis, dan prioritas pembangunan sehingga berdampak pada kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah Sekolah Menengah Atas di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 15% dari tahun 2015 hingga 2020 dengan pendistribusian yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena serupa juga terjadi di Provinsi Jawa Timur, terutama di Kota Surabaya sebagai salah satu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terpadat di Indonesia dengan penduduk lebih dari 3,02 juta jiwa (BPS Kota Surabaya, 2025). Berdasarkan data BPS Surabaya 2024, Kota Surabaya memiliki sebanyak 22 Sekolah Menengah Atas (SMA). Surabaya juga memiliki potensi ekonomi tinggi, namun ketidakseimbangan dengan pembangunan SMA dapat mempengaruhi laju mobilitas sosial dan memperluas tingkat kesenjangan pendidikan. Menurut dari laporan World Bank (2021) mengenai pendidikan di negara berkembang, terjadi ketimpangan akses pendidikan di tingkat sekolah menengah dapat menyebabkan penurunan indeks pembangunan manusia (IPM) serta peningkatan angka jumlah pengangguran muda. Faktor terjadinya ketimpangan di Kota Surabaya karena adanya urbanisasi yang tinggi dan migrasi penduduk memperburuk masalah ini karena wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan mengalami kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga anak dari keluarga berpenghasilan rendah kesulitan dalam mengakses SMA yang berkualitas.

Oleh karena itu, analisis ketimpangan jumlah pembangunan sekolah menengah atas di Kota Surabaya dapat digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah dan perencanaan pembangunan sekolah. penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pola sebaran pembangunan, mengetahui tingkat ketimpangan jumlah pembangunan dan mengetahui faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan sekolah SMA di Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai ketimpangan jumlah pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Surabaya, khususnya terkait distribusi antar kecamatan dan implikasinya terhadap akses pendidikan. Dengan metode ini, peneliti menelaah isi dokumen untuk menemukan pola, kecenderungan, serta hambatan dalam pembangunan pendidikan sekolah menengah atas. Pendekatan kualitatif dapat memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk memahami konteks sosial secara mendalam, termasuk aspek kebijakan dan ekonomi yang memengaruhi pemerataan layanan pendidikan (Savitri & Rahaju, 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian menjadi lebih fleksibel dalam menelusuri fenomena pemerataan pendidikan di Surabaya yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, demografi, dan kebijakan publik.

Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak berupaya menguji hipotesis, melainkan menjelaskan kondisi yang ada secara apa adanya (Anwar, 2022). Ketimpangan pembangunan SMA dikaji melalui data sekunder berupa dokumen resmi, laporan institusional, dan publikasi akademik. Dengan cara ini, penelitian tetap dapat berjalan meskipun keterbatasan akses terhadap seluruh data lapangan. Pendekatan deskriptif juga membantu menguraikan secara rinci perbedaan pembangunan antar kecamatan, faktor penyebab ketimpangan, serta dampak yang

dirasakan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pada literatur mengenai pemerataan pembangunan pendidikan.

Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Metode analisis dokumen memungkinkan peneliti memanfaatkan laporan, arsip, dan publikasi pemerintah untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai distribusi pembangunan SMA. Analisis semacam ini juga penting karena dapat mengungkap pola kebijakan pendidikan yang tidak selalu tampak melalui data statistik murni. Dengan demikian, metode ini relevan untuk mengkaji ketimpangan pembangunan sekolah berbasis kebijakan, kondisi sosial ekonomi, dan praktik perencanaan pendidikan di Surabaya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperlihatkan peta ketimpangan sekaligus memberikan masukan untuk perumusan kebijakan pendidikan yang lebih merata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan hasil analisis ketimpangan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Surabaya. Analisis dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi jumlah sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15–19 tahun di setiap kecamatan. Data yang digunakan meliputi jumlah SMA negeri, jumlah SMA swasta, serta jumlah penduduk usia 15–19 tahun di masing-masing kecamatan. Selanjutnya dihitung rasio penduduk usia SMA terhadap jumlah sekolah, nilai Y_i/Y_i , dan komponen perhitungan $(Y_i - \bar{Y})^2 f_i$ untuk memperoleh nilai indeks.

Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan ketimpangan pembangunan SMA di Kota Surabaya.

Tabel 1 Ketimpangan Pembangunan SMA di Kota Surabaya

| Kecamatan | Jumlah Sekolah SMA (Negeri) | Jumlah Sekolah SMA (Swasta) | Jumlah Penduduk kelompok umur 15-19 tahun | Rasio | Y_i | $(Y_i - \bar{Y})^2 * f_i$ |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------|----------|---------------------------|
| Karang Pilang - (Selatan) | | 2 | 5784 | 2,892 | 0.000346 | 0.000380 |
| Jambangan (Selatan) | 1 | 2 | 4330 | 1,443 | 0.000693 | 0.000036 |
| Gayungan (Selatan) | 1 | 3 | 3516 | 879 | 0.001138 | 0.001009 |
| Wonocolo (Selatan) | 1 | 6 | 6202 | 886 | 0.001129 | 0.001721 |
| Wonokromo (Selatan) | - | 6 | 12280 | 2,047 | 0.000489 | 0.000158 |
| Dukuh Pakis - (Selatan) | | 4 | 4442 | 1,110 | 0.000900 | 0.000396 |
| Wiyung (Selatan) | 1 | 2 | 5813 | 1,938 | 0.000516 | 0.000043 |
| Sawah (Selatan) | 1 | 6 | 15614 | 2,231 | 0.000448 | 0.000368 |
| Tenggiling Mejoyo (Timur) | 1 | 1 | 4483 | 2,242 | 0.000446 | 0.000109 |

RENWILKO : Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 1 (2) (2025): 13-19

| Kecamatan | Jumlah Sekolah SMA (Negeri) | Jumlah Sekolah SMA (Swasta) | Jumlah Penduduk kelompok umur 15-19 tahun | Rasio | Yi | $(Y_i - \bar{Y})^2 * f_i$ |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------|----------|---------------------------|
| Gunung Anyar - (Timur) | - | - | 4584 | 2,292 | 0.000436 | 0.000126 |
| Rungkut (Timjur) | 2 | 2 | 9062 | 2,266 | 0.000441 | 0.000234 |
| Sukolilo (Timur) | 1 | 10 | 8730 | 794 | 0.001260 | 0.003781 |
| Mulyorejo (Timur) | - | 8 | 6645 | 831 | 0.001204 | 0.002408 |
| Gubeng (Timur) | - | 8 | 10108 | 1,264 | 0.000791 | 0.000363 |
| Tambaksari (Timur) | 1 | 6 | 17307 | 2,472 | 0.000404 | 0.000675 |
| Lakarsantri (Barat) | 1 | 5 | 5247 | 874 | 0.001144 | 0.001539 |
| Sambikerep (Barat) | - | 9 | 5352 | 595 | 0.001682 | 0.006239 |
| Tandes (Barat) | 1 | 2 | 7504 | 2,501 | 0.000400 | 0.000307 |
| Suko Manunggal (Barat) | - | 6 | 7951 | 1,325 | 0.000755 | 0.000185 |
| Asemrowo (Barat) | - | 1 | 4067 | 4,067 | 0.000246 | 0.000516 |
| Benowo (Barat) | 1 | 1 | 6155 | 3,078 | 0.000325 | 0.000472 |
| Pakal (Barat) | - | 3 | 5206 | 1,735 | 0.000576 | 0.000003 |
| Tegalsari (Pusat) | - | 3 | 7388 | 2,463 | 0.000406 | 0.000283 |
| Genteng (Pusat) | 6 | 4 | 4600 | 460 | 0.002174 | 0.011367 |
| Simokerto (Pusat) | - | 4 | 7087 | 1,772 | 0.000564 | 0.000010 |
| Bubutan (Pusat) | - | 1 | 7734 | 7,734 | 0.000129 | 0.001728 |
| Kenjeran (Utara) | 1 | 1 | 14750 | 7,375 | 0.000136 | 0.003208 |
| Bulak (Utara) | 1 | - | 3961 | 1,980 | 0.000505 | 0.000037 |
| Semampir (Utara) | 1 | 2 | 15041 | 5,014 | 0.000199 | 0.002437 |
| Pabean Cantian (Utara) | - | 3 | 5890 | 1,963 | 0.000509 | 0.000051 |

| Kecamatan | Jumlah Sekolah SMA (Negeri) | Jumlah Sekolah SMA (Swasta) | Jumlah Penduduk kelompok umur 15-19 tahun | Rasio | Yi | $(Y_i - \bar{Y})^2 * f_i$ |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------|----------|---------------------------|
| Kremlangan (Utara) | - | 6 | 9072 | 1,512 | 0.000661 | 0.000032 |

Dari Perhitungan pada tabel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut

- a. Kecamatan Karang Pilang: 2 SMA untuk 5,784 penduduk usia SMA (~2,892 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata,
- b. Kecamatan Jambangan: 3 SMA untuk 4,330 penduduk usia SMA (~1,443 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong relatif surplus sekolah,
- c. Kecamatan Gayungan: 4 SMA untuk 3,516 penduduk usia SMA (~879 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong relatif surplus sekolah,
- d. Kecamatan Wonocolo: 7 SMA untuk 6,202 penduduk usia SMA (~886 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong relatif surplus sekolah,
- e. Kecamatan Wonokromo: 6 SMA untuk 12,280 penduduk usia SMA (~2,047 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- f. Kecamatan Dukuh Pakis: 4 SMA untuk 4,442 penduduk usia SMA (~1,110 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong relatif surplus sekolah.
- g. Kecamatan Wiyung: 3 SMA untuk 5,813 penduduk usia SMA (~1,938 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- h. Kecamatan Sawahan: 7 SMA untuk 15,614 penduduk usia SMA (~2,231 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- i. Kecamatan Tenggilis Mejoyo: 2 SMA untuk 4,483 penduduk usia SMA (~2,242 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- j. Kecamatan Gunung Anyar: 2 SMA untuk 4,584 penduduk usia SMA (~2,292 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- k. Kecamatan Rungkut: 4 SMA untuk 9,062 penduduk usia SMA (~2,266 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- l. Kecamatan Sukolilo: 11 SMA untuk 8,730 penduduk usia SMA (~794 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong relatif surplus sekolah.
- m. Kecamatan Mulyorejo: 8 SMA untuk 6,645 penduduk usia SMA (~831 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong relatif surplus sekolah.
- n. Kecamatan Gubeng: 8 SMA untuk 10,108 penduduk usia SMA (~1,264 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong relatif surplus sekolah.
- o. Kecamatan Tambaksari: 7 SMA untuk 17,307 penduduk usia SMA (~2,472 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- p. Kecamatan Lakarsantri: 6 SMA untuk 5,247 penduduk usia SMA (~874 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong relatif surplus sekolah.
- q. Kecamatan Sambikerep: 9 SMA untuk 5,352 penduduk usia SMA (~595 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong relatif surplus sekolah.
- r. Kecamatan Tandes: 3 SMA untuk 7,504 penduduk usia SMA (~2,501 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- s. Kecamatan Suko Manunggal: 6 SMA untuk 7,951 penduduk usia SMA (~1,325 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong relatif surplus sekolah.
- t. Kecamatan Asemrowo: 1 SMA untuk 4,067 penduduk usia SMA (~4,067 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong timpang (kekurangan sekolah).
- u. Kecamatan Benowo: 2 SMA untuk 6,155 penduduk usia SMA (~3,078 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata,

- v. Kecamatan Pakal: 3 SMA untuk 5,206 penduduk usia SMA (~1,735 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- w. Kecamatan Tegalsari: 3 SMA untuk 7,388 penduduk usia SMA (~2,463 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- x. Kecamatan Genteng: 10 SMA untuk 4,600 penduduk usia SMA (~460 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong relatif surplus sekolah.
- y. Kecamatan Simokerto: 4 SMA untuk 7,087 penduduk usia SMA (~1,772 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- z. Kecamatan Bubutan: 1 SMA untuk 7,734 penduduk usia SMA (~7,734 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong timpang (kekurangan sekolah).
- aa. Kecamatan Kenjeran: 2 SMA untuk 14,750 penduduk usia SMA (~7,375 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong timpang (kekurangan sekolah).
- bb. Kecamatan Bulak: 2 SMA untuk 3,961 penduduk usia SMA (~1,980 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- cc. Kecamatan Semampir: 3 SMA untuk 15,041 penduduk usia SMA (~5,014 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong timpang (kekurangan sekolah).
- dd. Kecamatan Pabean Cantian: 3 SMA untuk 5,890 penduduk usia SMA (~1,963 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.
- ee. Kecamatan Krembangan: 6 SMA untuk 9,072 penduduk usia SMA (~1,512 penduduk/SMA). Kondisi ini tergolong cukup merata.

Berdasarkan data jumlah SMA dan jumlah penduduk usia 15–19 tahun di tiap kecamatan, dilakukan perhitungan dengan menggunakan Indeks Williamson. Nilai yang diperoleh adalah 0,686, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi dalam distribusi SMA di Surabaya. Beberapa kecamatan dengan penduduk usia SMA yang besar, seperti Wonokromo, Rungkut, dan Tambaksari, memiliki rasio penduduk usia SMA per sekolah yang tinggi. Kondisi ini menandakan bahwa sekolah-sekolah di wilayah tersebut menanggung beban lebih besar dalam menampung siswa. Sebaliknya, kecamatan seperti Tegalsari dan Genteng memiliki jumlah sekolah yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia SMA. Rasio penduduk per sekolah di wilayah ini lebih rendah, sehingga ketersediaan akses pendidikan lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, distribusi sekolah SMA di Kota Surabaya menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,686. Hal ini mengindikasikan bahwa persebaran sekolah SMA tidak merata antar kecamatan. Beberapa kecamatan seperti Semampir, Kenjeran, Bubutan, dan Asemrowo memiliki jumlah SMA yang relatif sedikit, sementara jumlah penduduk usia SMA di wilayah tersebut cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sekolah.

Akibat keterbatasan jumlah sekolah di kecamatan tersebut, banyak siswa harus memilih SMA di luar kecamatan domisili, atau apabila tidak diterima melalui jalur yang tersedia, terpaksa melanjutkan pendidikan di SMA swasta yang dekat dengan tempat tinggalnya. Temuan ini menegaskan perlunya upaya pemerataan pembangunan sekolah SMA di Surabaya agar akses pendidikan menengah lebih inklusif, terutama di wilayah dengan penduduk usia sekolah yang tinggi namun fasilitas pendidikan yang kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. S., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 109-124.
- Anwar, M. S. (2022). *Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural*. *Foundasia*, 13 (1), 1–15.

- Benyamin, Y. (2012) *Kajian Kelembagaan Penyelesaian Konflik Batas Laut Daerah*. The thesis of Geodesy Engineering, Bandung Institute of Technology.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik pendidikan Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2025, Februari Jum'at). *Kota Surabaya Dalam Angka 2024*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya: <https://surabayakota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/bd1f25e59ae790cc8a7c0c07/kota-surabaya-dalam-angka-2025.html>
- Hamka, H., Misilia, M., & Malik, R. (2022). Analisis Distribusi Fasilitas Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(03), 484-492.
- Hoffman, M., S. Hayes, dan M. Napolitano (2014) Urban Youths' Experiences and Perceptions of a Community Cycling Initiative. *Planning Theory* 51(2), 300-318.
- Hujaimah, S., Fadhilah, A. A., Fiqri, R., Sasmita, P., Salsabila, N., Mariani, M., ... & Santoso, G. (2023). Faktor, penyebab, dan solusi kesenjangan sosial dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 2(6), 142-148.
- Kraas, F. et.al. (Ed.) (2013) *Megacities: Our Global Urban Future*. Dordrecht: Springer.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetya, R. A., & Pribadi, F. (2021). Akses Pendidikan Masyarakat Urban Pasca Penerapan Sistem Zonasi di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(1), 32-42.
- Revaldi, T. K. (2023). PEMETAAN LOKASI GEDUNG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KOTA SURABAYA MENGIKUTI DENGAN ADANYA ZONASI BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG). *Jurnal Vokasi Teknik Sipil*, 1(3), 111-116.
- Rosly, D., N. Puzi, dan M. Arshad (2012) Planning Strategies, Guidelines and Action Plan for Green Neighbourhoods in Malaysia. Paper presented at *EAROPH Congress: Green Cities for Human Betterment*, Daegu, 10-17 October
- Rusunawa di Tasik Dibangun Kemenpera untuk Santri. *Kompas*, 14 January 2014.
- Savitri, A., & Rahaju, T. (2021). Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan (Studi Pada Jenjang SMA Negeri Di Kota Surabaya). *Publika*, 161-170.
- Benyamin, Y. (2012) *Kajian Kelembagaan Penyelesaian Konflik Batas Laut Daerah*. The thesis of Geodesy Engineering. Bandung Institute of Technology.
- Siregar, A. (2014) Indonesian Summit Diplomacy in 2013. *The Jakarta Post*, 10th January. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/10/indonesian-summit-diplomacy-2013.html> on 14th January 2014.
- Tirtosudarmo, R. (2013) Urbanization without Development: The Cases of Cirebon and Gresik on Java's North Coast. Dlm: Bunnell, T., Parthasarathy & E. Thompson (Ed.) (2013) *Cleavage, Connection and Conflict in Rural, Urban and Contemporary Asia*, pp. 99-115. Singapore: Springer.
- Yin, J. (2012) *Urban Planning for Dummies*. Mississauga: John Wiley & Sons